

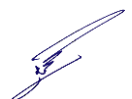
RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI  
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR        TAHUN 2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien berdasarkan klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis, perlu mengatur klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun



- 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan



pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

#### Pasal 2

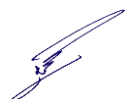
Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pengelolaan Arsip Dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan Arsip.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan
  - b. Klasifikasi Arsip substantif.
- (2) Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengelompokan Arsip yang berkaitan dengan fungsi fasilitatif yang meliputi:
  - a. keuangan;
  - b. kepegawaian;
  - c. organisasi dan tata laksana;
  - d. reformasi birokrasi;
  - e. perencanaan;
  - f. hukum;
  - g. umum;
  - h. pengadaan barang/jasa;
  - i. hubungan masyarakat; dan
  - j. pengawasan.
- (3) Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelompokan arsip yang berkaitan dengan fungsi substantif yang meliputi:
  - a. program prioritas;
  - b. pembangunan desa dan perdesaan;
  - c. pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal;
  - d. percepatan pembangunan daerah tertinggal;
  - e. pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal; dan
  - f. pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

#### Pasal 4

- (1) Skema Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas:
  - a. fungsi sebagai pokok masalah;
  - b. kegiatan sebagai sub masalah; dan
  - c. transaksi sebagai sub-sub masalah.



- (2) Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelaksanaan fungsi dan tugas.

#### Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi antara huruf dan angka.
- (2) Penggunaan kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan urutan:
  - a. kode huruf untuk pengenalan pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode;
  - b. kode angka untuk sub masalah ditempatkan pada bagian kedua dari susunan kode; dan
  - c. kode angka untuk sub-sub masalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar:
  - a. penomoran naskah dinas;
  - b. pemeliharaan Arsip aktif dan inaktif; dan
  - c. penyusutan Arsip.

#### Pasal 6

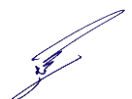
Rincian kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369);
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1051); dan
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1129),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (SEKRETARIS JENDERAL)		
Pengendali Teknis (KARO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN)		
Pengendali Aspek Hukum (KARO HUKUM)		
Materi (KASUBAG TU BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN)		

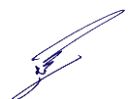


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN       DESA       DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

RINCIAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SISTEMATIKA

- BAB I       BENTUK, SUSUNAN, DAN CARA PENGGUNAAN  
          A.   BENTUK DAN SUSUNAN  
          B.   CARA PENGGUNAAN  
BAB II       KODE KLASIFIKASI ARSIP  
          A.   KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF  
          B.   KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF



## BAB I BENTUK, SUSUNAN, DAN CARA PENGGUNAAN

### A. BENTUK DAN SUSUNAN

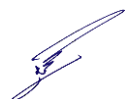
1. Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi/kegiatan.
2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan dibagi menjadi 3 (tiga) perincian dasar. Perincian pertama, perincian kedua, dan perincian ketiga merupakan pola dasar yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Untuk membedakan rincian pertama, kedua, dan ketiga dipergunakan kode huruf dan angka. Huruf merupakan kode rincian pokok masalah, angka pertama merupakan kode rincian sub masalah dan angka kedua merupakan kode rincian sub-sub masalah.

### B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami Klasifikasi Arsip harus memahami rincian pertama, kedua, dan ketiga serta memahami hubungan antara masalah dengan sub masalah dan sub-sub masalahnya.
2. Tiap kode sub masalah dan sub-sub masalah merupakan rincian dari pokok masalah. Contoh:  
HKM : Kode rincian pokok masalah dari Hukum  
03 : Kode rincian sub masalah dari Keputusan  
01 : Kode rincian sub-sub masalah dari Keputusan Menteri  
Dari contoh di atas dapat diartikan bahwa kode HKM.03.01 merupakan naskah dinas yang berkaitan dengan keputusan sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi keputusan.
3. Untuk dapat menentukan kode klasifikasi suatu Arsip secara tepat harus dipahami masalah yang terkandung dan dari sudut pandang mana masalah itu disajikan.
4. Arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah harus ditetapkan masalah yang lebih utama dikaitkan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang mendayagunakan Arsip.
5. Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian terdiri atas 16 (enam belas) pokok masalah, yang terdiri dari kegiatan fasilitatif dan substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian baik di pusat maupun di unit pelaksana teknis, yaitu:
  - a. kegiatan fasilitatif terdapat 10 (sepuluh) pokok masalah:

1) keuangan	kode KEU
2) Kepegawaian	kode KPG
3) organisasi dan tata laksana	kode OTL
4) reformasi birokrasi	kode RFB
5) perencanaan	kode PRC
6) Hukum	kode HKM
7) Umum	kode UMM
8) pengadaan barang/jasa	kode PBJ
9) Humas	kode HMS
10) pengawasan	kode PWS
  - b. kegiatan substantif terdapat 6 (enam) pokok masalah:

1) program prioritas	kode PRI
2) pembangunan desa dan perdesaan	kode PDP



- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 3) | pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal                           | kode PEI |
| 4) | percepatan pembangunan daerah tertinggal  | kode PDT |
| 5) | pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal                                   | kode BPI |
| 6) | pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal | kode SDM |



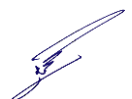


BAB II  
KODE KLASIFIKASI ARSIP

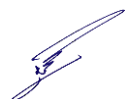
A. KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

1. KEU KEUANGAN

- 00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
  - 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara
  - 02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Kementerian dengan Komisi Dewan  
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  - 03 Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan  
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  - 04 Ketetapan Pagu Definitif
  - 05 Rencana Kerja dan Anggaran
  - 06 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan Petunjuk  
Operasional Kegiatan termasuk revisinya
  - 07 Standar Biaya Khusus, Standar Biaya Masukan Lainnya
- 01 Pelaksanaan Anggaran
  - 01 Laporan Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan  
Kerja/Eselon I
  - 02 Laporan Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kementerian
  - 03 Laporan Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Sumber  
dana
  - 04 Laporan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- 02 Belanja
  - 01 Surat Penyedia Dana antara lain: Surat Permintaan  
Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan  
Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, Surat  
Permintaan Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan  
Pembayaran Langsung
  - 02 Pembukuan Anggaran
  - 03 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi  
Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
  - 04 Kartu Kredit Pemerintah
  - 05 Gagal Bayar
- 03 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
  - 01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri
  - 02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai
  - 03 Dokumen *Memorandum of Understanding* dan Dokumen  
Sejenisnya
  - 04 Dokumen *Loan Agreement*
  - 05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri
  - 06 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri
  - 07 Otorisasi Penarikan Dana
  - 08 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri
  - 09 Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor
  - 10 Laporan Kemajuan, Bulanan, dan Triwulan
  - 11 Laporan Penyelesaian/Laporan Tahunan
  - 12 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Bantuan/  
Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian
- 04 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dana  
Pinjaman/Hibah Luar Negeri
  - 01 Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Berita  
Acara Serah Terima Jabatan



- 02 Penetapan Kuasa Pengguna Barang/Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 03 Penetapan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 04 Penetapan Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Barang
- 05 Penetapan Pengelola Keuangan Kementerian/Unit Kerja
- 06 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Bendahara Pembantu termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 05 Sistem Akuntansi Instansi
  - 01 Berita Acara Rekonsiliasi
  - 02 Register Transaksi Harian, Dokumen Sumber, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Bukan Pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja, Surat Perintah Membayar
  - 03 Laporan Realisasi Bulanan Sistem Akuntansi Instansi/Triwulan/Semester
- 06 Akuntansi dan Pelaporan
  - 01 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan
  - 02 Akuntansi dan pelaporan keuangan (triwulan, semester, dan tahunan)
- 07 Perbendaharaan dan penatausahaan keuangan
  - 01 Dokumen Pengajuan Gaji Induk (Gaji dan Tunjangan Kinerja)
  - 02 Dokumen Pengajuan Lembur dan Uang Makan
  - 03 Surat Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai/Mutasi/Diberhentikan
  - 04 Kartu Gaji
  - 05 Surat Setoran Surat Setoran Bukan Pajak
  - 06 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja
  - 07 Bukti Setor Bunga dan/atau Jasa Giro Bank
  - 08 Laporan Kas
  - 09 Piutang
  - 10 Hutang
- 08 Barang Milik Negara
  - 01 Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
  - 02 Inventarisasi Barang Milik Negara
  - 03 Pengelolaan Barang Milik Negara
  - 04 Penghapusan/hibah Barang Milik Negara
  - 05 Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
  - 06 Laporan Barang Milik Negara
  - 07 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Negara
  - 08 Surat Teguran Kelalaian Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 09 Penerimaan Negara Bukan Pajak
  - 01 Usulan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak baik ke Kementerian Keuangan maupun internal
  - 02 Kontrak/Perjanjian Sewa Penerimaan Negara Bukan Pajak



- 03 Penagihan/Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 04 Prosedur Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 05 Keringanan/Keberatan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 06 Pemeriksaan dan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 07 Sanksi/Denda Penerimaan Negara Bukan Pajak

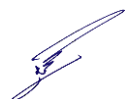
## 2. KPG KEPEGAWAIAN

- 00 Formasi Pegawai
  - 01 Usulan dari Unit Kerja
  - 02 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) Tahun
  - 03 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - 04 Penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - 05 Pengangkatan dan Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 01 Penerimaan/Pengadaan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - 01 Proses Penerimaan Pegawai
    - Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian dan wawancara
  - 02 Penetapan Pengumuman Kelulusan
  - 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
  - 04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai
    - Naskah dinas yang meliputi surat lamaran, ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, kartu kuning dan surat keterangan kesehatan
- 02 Pembinaan Karir Pegawai
  - 01 Pelatihan/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
    - Naskah dinas yang berkaitan dengan surat perintah/surat tugas/surat keputusan/surat izin dan laporan kegiatan pengembangan diri
  - 02 Surat Tanda Tamat Pelatihan/Sertifikat Pegawai
  - 03 Standar Kinerja Pegawai
    - Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai
  - 04 Berkas Disiplin Pegawai
    - Naskah dinas yang meliputi daftar hadir, rekapitulasinya dan hukuman disiplin
  - 05 Penghargaan dan Tanda Jasa
  - 06 Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
    - Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kompetensi, *workshop*, *benchmarking*, dan magang pegawai

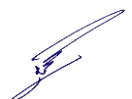


- 03 Manajemen Karir
  - 01 Manajemen Talenta
  - 02 Penilaian/Uji Potensi dan/atau Kompetensi
  - 03 Pengembangan Pegawai Negeri Sipil
    - Naskah dinas berkaitan dengan penyusunan daftar rencana pelatihan, pelatihan, kursus, tugas belajar, beasiswa, *workshop*, *benchmarking*, dan magang pegawai
  - 04 Pola Karir Pegawai Negeri Sipil
- 04 Penyelaksanaan Pengelolaan Keberatan Pegawai
- 05 Mutasi Pegawai Negeri Sipil
  - 01 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan, Mutasi antar-Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar-Unit
  - 02 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
  - 03 Mutasi Keluarga
  - 04 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
  - 05 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional
  - 06 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
  - 07 Peninjauan Masa Kerja
  - 08 Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
  - 09 Pelantikan Jabatan
- 06 Administrasi Pegawai
  - 01 Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil
  - 02 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
  - 03 Cuti Alasan Penting Pegawai Negeri Sipil
  - 04 Cuti di Luar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil
  - 05 Cuti Bersama Selama Perjanjian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - 06 Dokumentasi Identitas Pegawai
    - Naskah dinas yang berkaitan usul penetapan kartu pegawai/kartu pegawai elektronik/kartu istri/kartu suami, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, laporan pajak penghasilan pribadi dan keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai
  - 07 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan
  - 08 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil
  - 09 Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan
  - 10 Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja
  - 11 Sistem Informasi Kepegawaian
  - 12 Pernyataan tidak sedang menjalani proses atau pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - 13 Keterangan Kerja
  - 14 Ujian Dinas dan/atau penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil
  - 15 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun
  - 16 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya dan Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal

- 07 Kesejahteraan Pegawai
  - 01 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
  - 02 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
  - 03 Berkas tentang Layanan Dana Pensiun/Tabungan Pensiun
  - 04 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
  - 05 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
  - 06 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
  - 07 Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas
  - 08 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
  - 09 Berkas tentang Pemberian Penghargaan/Tanda Kehormatan/Tanda Jasa
  - 10 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi
- 08 Berkas tentang Perayaan Hari Besar Nasional/Keagamaan
- 09 Berkas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
- 10 Administrasi Magang Siswa/Mahasiswa
- 11 Perselisihan/Sengketa Pegawai
- 12 Berkas Perseorangan Pejabat Negara
- 13 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil
  - 01 Berkas Lamaran yang Diterima
  - 02 Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya
  - 03 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
  - 04 Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  - 05 Hasil Pengujian Kesehatan
  - 06 Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
  - 07 Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
  - 08 Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
  - 09 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan
  - 10 Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional
  - 11 Surat Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja
  - 12 Surat Keputusan Perpindahan antar-Instansi
  - 13 Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara
  - 14 Berita Acara Pemeriksaan
  - 15 Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - 16 Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk
  - 17 Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan
  - 18 Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu
  - 19 Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara
  - 20 Surat Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
  - 21 Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil



- 22 Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
- 23 Surat Keterangan Pernyataan Hilang
- 24 Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang
- 25 Surat Keputusan Penggantian Nama
- 26 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
- 27 Akta Nikah/Cerai
- 28 Akta Kelahiran
- 29 Isian Formulir Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil
- 30 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara dan Jabatan
- 31 Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik
- 32 Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- 33 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang
- 34 Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
- 35 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
- 36 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
- 37 Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
- 38 Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri
- 39 Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri
- 40 Ijazah/Sertifikat
- 41 Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai
- 42 Surat Keputusan Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk
- 43 Surat Pertimbangan Status Pegawai Negeri Sipil
- 44 Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 45 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
- 46 Surat Keputusan Pensiun
- 47 Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang
- 48 Surat Pernyataan Rencana Penempatan
- 14 Berkas Perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - 01 Penetapan kartu pegawai/kartu pegawai elektronik/kartu istri/kartu suami, Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan, Laporan Pajak Penghasilan Pribadi dan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai
  - 02 Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan
  - 03 Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja
  - 04 Sistem Informasi Kepegawaian
  - 05 Keterangan Kerja
  - 06 Berkas Lamaran yang Diterima
  - 07 Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya
  - 08 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
  - 09 Hasil Pengujian Kesehatan
  - 10 Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - 11 Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PPPK
  - 12 Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

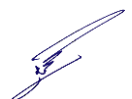




- 13 Surat Keterangan Pernyataan Hilang
- 14 Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dinyatakan hilang
- 15 Surat Keputusan Penggantian Nama
- 16 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
- 17 Akta Nikah/Cerai
- 18 Akta Kelahiran
- 19 Isian Formulir Pendaftaran Ulang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 20 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 21 Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik
- 22 Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- 23 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang
- 24 Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri
- 25 Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 26 Ijasah/Sertifikat
- 27 Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai
- 28 Surat Pertimbangan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 29 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
- 30 Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang
- 31 Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 32 Surat Pernyataan Rencana Penempatan
- 15 Pegawai Kontrak
  - 01 Proses penerimaan Pegawai Kontrak  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman penerimaan, pengumuman seleksi administrasi, pengumuman wawancara, pengumuman akhir penerimaan dan berita acara pelaksanaan penerimaan Pegawai Kontrak
  - 02 Kontrak/Perjanjian Kerja Pegawai Kontrak
  - 03 Berkas Perseorangan Pegawai Kontrak  
Naskah dinas yang berkaitan dengan *personal file* Pegawai Kontrak
  - 04 Pemberhentian Pegawai Kontrak
  - 05 Pengalaman Kerja
- 16 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
  - 01 Proses Penerimaan
  - 02 Berkas Perseorangan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

### 3. OTL ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 00 Struktur Organisasi Kementerian
  - 01 Pembentukan
  - 02 Perubahan
  - 03 Pembubaran
- 01 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
- 02 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
- 03 Evaluasi Kelembagaan
- 04 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja



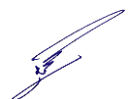
- 05 Ketatalaksanaan
- 06 Bisnis Proses
- 07 Evaluasi Jabatan
- 08 Peta Jabatan
- 09 Budaya Kerja/Etika Organisasi
- 10 Penghargaan Kelembagaan
- 11 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/  
Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/  
Internasional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan standar/  
pedoman/prosedur kerja yang menunjang kinerja pegawai di  
lingkungan Kementerian maupun masyarakat umum
- 12 Penataan Organisasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi  
sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur, dan  
pengembangan sistem pengawasan

4. RFB REFORMASI BIROKRASI

- 00 Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi berkaitan  
dengan sinergi antar lembaga dengan kolaborasi  
kementerian/lembaga yang menangani fungsi reformasi  
birokrasi
- 01 Agen Perubahan
- 02 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
- 03 Evaluasi Reformasi Birokrasi
- 04 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 05 Zona Integritas  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri  
Pelaksanaan Zona Integritas

5. PRC PERENCANAAN

- 00 Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
  - 01 Rencana Pembangunan dan strategi pembangunan
  - 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Rencana  
Strategis/Strategi Nasional
  - 03 Manajemen Risiko (selera risiko, peta risiko)
  - 04 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan  
Pembangunan Nasional
  - 05 Indikator Kinerja Utama
- 01 Program Kerja
  - 01 Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi (Rencana  
Kerja Pemerintah, *Bilateral Meeting*, *Trilateral Meeting*)
  - 02 Program Kerja Tahunan Unit Kerja terdiri dari: rencana  
kerja, rencana koordinasi teknis perencanaan  
pembangunan, dan rapat koordinasi pembangunan  
wilayah
  - 03 Perjanjian Kinerja/Pakta Integritas
  - 04 Rencana Aksi Nasional
  - 05 Inisiatif Baru
- 02 Penetapan/Kontrak Kinerja
  - 01 Menteri
  - 02 Pimpinan Unit Kerja





- 03 Laporan
  - 01 Laporan Berkala (Pidato Presiden, Manajemen Risiko)
  - 02 Laporan Monitoring dan Evaluasi
  - 03 Laporan Kinerja Anggaran
  - 04 Laporan Kinerja
  - 05 Laporan Insidental
- 04 Evaluasi Program
  - 01 Evaluasi Program dan Anggaran
  - 02 Evaluasi Program Unit Kerja
  - 03 Evaluasi Program Kementerian
  - 04 Evaluasi Kinerja Anggaran
- 05 Kerja Sama
  - 01 Kerja Sama Bilateral, Multilateral
  - 02 Kerja Sama antar Kementerian/Lembaga

## 6. HKM HUKUM

- 00 Program Legislasi
  - 01 Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Kementerian
  - 02 Program Legislasi Kementerian
- 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
  - 01 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - 02 Rancangan Peraturan Pemerintah
  - 03 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden
- 02 Peraturan Menteri

Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan Menteri sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan
- 03 Keputusan

Naskah dinas yang berkaitan dengan keputusan sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi keputusan

  - 01 Keputusan Menteri
  - 02 Keputusan Pejabat Setingkat Eselon I
- 04 Instruksi

Naskah dinas yang berkaitan dengan instruksi sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi instruksi

  - 01 Instruksi Menteri
  - 02 Instruksi Pejabat Setingkat Eselon I
- 05 Surat Edaran

Naskah dinas yang berkaitan dengan surat edaran sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi surat edaran

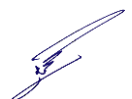
  - 01 Surat Edaran Menteri
  - 02 Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I
- 06 Nota Kesepahaman/Kontrak/Perjanjian Kerja Bersama

Naskah dinas yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama/*Memorandum of Understanding*/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama/*Letter of Intens*

  - 01 Dalam Negeri
  - 02 Internasional
- 07 Dokumentasi Hukum

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- 08 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum

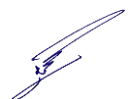


- 09 Bantuan/Konsultasi/Advokasi Hukum  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan bantuan/konsultasi/advokasi hukum
- 10 Kasus/Sengketa Hukum
  - 01 Pidana
  - 02 Perdata
  - 03 Tata Usaha Negara
- 11 Hak Kekayaan Intelektual
  - 01 Hak Cipta
  - 02 Hak Paten
  - 03 Hak Merk

## 7. UMM UMUM

- 00 Kearsipan
  - 01 Administrasi Persuratan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan urusan surat-menyurat yang terdiri atas pemberitahuan pindah kantor, penambahan nomor telepon, alamat pejabat, spesimen tanda tangan pejabat, cap dinas, stempel draf, penomoran naskah dinas, pengiriman, ekspedisi, dan penyimpanan
  - 02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketatalaksanaan, pengolahan, penyimpanan, analisis nilai guna, perawatan, dan konservasi, pelacakan arsip, penyelamatan arsip vital serta penyelamatan arsip terjaga
  - 03 Regulasi Kearsipan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan peraturan, koordinasi, persetujuan jadwal retensi arsip, dan proses pengesahan regulasi kearsipan
  - 04 Penyajian Arsip menjadi Informasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan proses koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Kementerian, sosialisasi pengelolaan sistem dan jaringan, evaluasi pelaksanaan usulan penyampaian arsip menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik dan pameran arsip
  - 05 Naskah Dinas Elektronik  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik, perubahan data sertifikat elektronik, pendampingan penggunaan layanan persuratan secara elektronik, evaluasi penerapan layanan persuratan secara elektronik, autentikasi arsip, dan penyusunan laporan penerapan layanan persuratan secara elektronik
  - 06 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)  
Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan arsip mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan
  - 07 Penyusutan Kearsipan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan

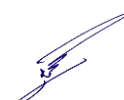
- 08 Pembinaan Kearsipan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan
- 09 Audit Kearsipan Eksternal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan persiapan, formulir, kelengkapan berkas, dan laporan audit kearsipan eksternal
- 10 Audit Kearsipan Internal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan persiapan pembentukan tim, penyampaian formulir, kelengkapan berkas, dan laporan audit Kearsipan internal
- 01 Kerumahtanggaan
  - 01 Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor  
Naskah dinas yang berkaitan dengan fasilitas kantor meliputi permintaan penggunaan ruang, lapangan, gedung, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya
  - 02 Pengurusan Kendaraan Dinas  
Naskah dinas yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, pengurusan pajak, plat nomor, bahan bakar minyak, dan sewa kendaraan pimpinan
  - 03 Pemeliharaan Gedung dan Taman
  - 04 Pengelolaan Jaringan Listrik, Jaringan Internet, Air, Telepon, Televisi, Kabel, dan Komputer  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon, televisi, kabel, dan komputer
  - 05 Ketertiban dan Keamanan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan masalah pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas.
  - 06 Administrasi Pengelolaan Parkir
  - 07 Sewa Fasilitas Kantor  
Naskah dinas yang berkaitan penyewaan fasilitas kantor oleh masyarakat/pihak lain
  - 08 Administrasi Pakaian Dinas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya
  - 09 Pengadaan Kebutuhan Layanan Kesehatan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan obat, persediaan barang habis pakai, dan alat medis
  - 10 Kerjasama Layanan Kesehatan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kerja sama tenaga kesehatan Kementerian dengan instansi terkait
  - 11 Laporan Layanan Kesehatan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan layanan kesehatan
- 02 Keprotokolan
  - 01 Penyelenggaraan Acara Kedinasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan agenda kegiatan kementerian, upacara hari besar nasional, apel kementerian, apel unit kerja eselon I, peringatan hari besar internal kementerian dan audiensi pimpinan (Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I)



- 02 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembinaan keprotokolan, forum komunikasi keprotokolan, dan evaluasi keprotokolan
- 03 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kunjungan kerja dan fasilitasi kegiatan Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Eselon I

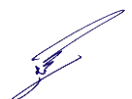
8. PBJ PENGADAAN BARANG/JASA

- 00 Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
  - 01 Standardisasi Pengadaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan standardisasi pengadaan termasuk sumber daya manusia, dokumen, peraturan pengadaan barang/jasa, standar operasional prosedur, dan sarana prasarana pengadaan
  - 02 Rencana Umum Pengadaan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan identifikasi dan analisa kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penerapan rencana penganggaran pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, pengumuman rencana pengadaan
  - 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan sertifikasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan layanan advokasi pengadaan
  - 04 Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sanggah  
Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan penanganan permasalahan kontrak, jasa, barang, dan konstruksi dan keterangan ahli terkait pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi
  - 05 Layanan Pengelolaan Pengadaan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelola pengadaan dan manajemen pengadaan
  - 06 Pengadaan Barang
  - 07 Pengadaan Konstruksi
  - 08 Pengadaan Jasa Konsultasi
  - 09 Pengadaan Jasa Lainnya
- 01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - 01 Pengadaan Secara Elektronik  
Naskah dinas yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui penyedia (dari proses persiapan pengumuman pengadaan, pengumuman pengadaan, penawaran sampai dengan penetapan pemenang) untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya
  - 02 Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan
  - 03 Pelaksanaan *E-Purchasing*  
Naskah dinas yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing*



9. HMS HUMAS

- 00 Dokumentasi/Liputan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi kegiatan peliputan, publikasi, pemberitaan, dokumentasi dan juru bicara
  - 01 Peliputan Kegiatan Brosur/ *Leaflet*/Poster/Plakat
  - 02 Publikasi dan Pemberitaan
  - 03 Dokumentasi Kegiatan
  - 04 Juru Bicara
  - 05 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival/Iklan
  - 06 Pidato dan Materi/Sambutan Pimpinan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan bahan/materi pidato pimpinan
  - 07 Ucapan Terima Kasih, Selamat, dan Belasungkawa
- 01 Informasi Kehumasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi kehumasan internal
  - 01 Kliping Koran
  - 02 Brosur/ *Leaflet*/Poster/Plakat
  - 03 Pengumuman
  - 04 Media Monitoring
  - 05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, Jurnal, dan Laporan
  - 06 Agenda Setting kementerian/lembaga
  - 07 Strategi Komunikasi
  - 08 Bahan Informasi Publik
- 02 Hubungan kelembagaan dan Kemitraan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi, terkait hubungan kelembagaan dan kemitraan
  - 01 Hubungan antar Lembaga Pemerintah Dalam Negeri (Mitra Kementerian/Lembaga, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif, Pemerintah Daerah)  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pemerintah/antar-kementerian
  - 02 Hubungan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama organisasi sosial, kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat
  - 03 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah terkait Kerjasama dan hubungan kelembagaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
  - 04 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda/Praktik Kerja Lapangan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
  - 05 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Asing
  - 06 Hubungan dengan Lembaga Asing Non Pemerintah



- 07 Hubungan Media Massa  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama media massa (siara pers, konferensi pers, kunjungan wartawan/peliputan), pendapat umum, serta pengaduan masyarakat
- 03 Rapat Kerja/Dengar Pendapat/*Hearing* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (dengar pendapat/*hearing*)
  - 01 Pengaduan, Permohonan Informasi dan Layanan Publik  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan pelaksanaan layanan publik
    - 01 Pengaduan Masyarakat
    - 02 Permohonan Informasi
    - 03 Pedoman Penyelenggaraan Layanan Publik
    - 04 Survei Kepuasan atas Pelayanan Publik
    - 05 Penilaian atas Layanan Publik
    - 06 Penyampaian Bahan Pustaka
    - 07 Pengadaan, Pengolahan, dan Perawatan Bahan Pustaka
  - 08 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
- 04 Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Kabinet, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal
- 06 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan laporan
- 07 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan
- 08 Pidato/Sambutan Pimpinan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan bahan/materi pidato Pimpinan
  - 01 Menteri
  - 02 Wakil Menteri
  - 03 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
- 09 Kepustakaan
  - 01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka
  - 02 Pengadaan dan Pengolahan Bahan
  - 03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
  - 04 Preservasi Bahan Pustaka

#### 10. PWS PENGAWASAN

- 00 Rencana Pengawasan
  - 01 Rencana Strategis Pengawasan
  - 02 Rencana Kerja Tahunan
  - 03 Rencana Kinerja Tahunan
  - 04 Penetapan Kinerja Tahunan
  - 05 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional





- 01 Pedoman Kebijakan Pengawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya
- 02 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya
- 03 Audit  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan audit sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan
  - 01 Audit Kinerja
  - 02 Audit dengan Tujuan Tertentu
  - 03 Audit Investigasi
  - 04 *Monthly Audit*
  - 05 Audit Lainnya
- 04 Reviu  
Naskah dinas yang berkaitan dengan reviu sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan
  - 01 Reviu laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan
  - 02 Reviu laporan kinerja
  - 03 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
  - 04 Reviu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Anggaran
  - 05 Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
  - 06 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
- 05 Evaluasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan di lingkup Kementerian
- 06 Pemantauan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hasil pengawasan
  - 01 Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan
  - 02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan
  - 03 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
  - 04 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal
  - 05 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Internal
  - 06 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Eksternal
  - 07 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - 08 Tuntutan Perbendaharaan  
naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi tuntutan perbendaharaan /tuntutan ganti rugi, seperti: laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/uang, surat keterangan tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, surat keterangan penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian tuntutan perbendaharaan /tuntutan ganti rugi

- 07 Pelaksanaan Pengawasan
  - 01 Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan)
  - 02 Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal
  - 03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan aparat pemeriksa fungsional seperti laporan hasil pemeriksaan, memorandum hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut/tanggapan laporan hasil pemeriksaan
  - 04 Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal
- 08 Pengawasan Lainnya  
Naskah dinas yang berkaitan dengan bimbingan teknis, sosialisasi pengawasan, konsultasi pengawasan, koordinasi pengawasan, pelatihan di kantor sendiri, meliputi surat penugasan, surat menyurat beserta laporan
- 09 Penerapan *Early Warning System*  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada Unit Kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan
- 10 Penerapan *Internal Audit Capability Model*  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan
- 11 Surat Keterangan/Pernyataan Bebas Temuan
- 12 Temuan Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
- 13 Penerapan Peta Risiko Pengawasan/Manajemen Resiko  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemetaan Resiko/Pengelolaan Resiko
- 14 Piagam Pengawasan
- 15 Pemeriksaan Khusus  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan khusus tentang penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara
- 16 Kertas Kerja Pemeriksaaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
  - 01 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang perlu ditindaklanjuti
  - 02 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang tidak perlu ditindaklanjuti
- 17 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 18 Satuan Pengawasan Intern  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern



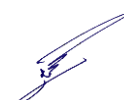


- 19 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 20 Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi Pengawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan hasil analisis dan evaluasi
- 21 Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan
- 22 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- 23 Pencegahan Korupsi
  - 01 Sapu Bersih Pungutan Liar
  - 02 Unit Penanganan Gratifikasi
  - 03 *Whistle Blowing System*
  - 04 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
  - 05 Survei Penilaian Integritas

#### B. KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

##### 1. PRI PROGRAM PRIORITAS

- 00 Badan Usaha Milik Desa Pendukung Makan Bergizi Gratis  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dukungan pendistribusian makan bergizi gratis
- 01 Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa  
(Swasembada Pangan)
- 02 Desa Swasembada Energi
- 03 Desa Swasembada Air
- 04 Desa Ekspor
- 05 Pemuda Pelopor Desa
- 06 Konsolidasi Program Kementerian/Lembaga Masuk Desa
- 07 Digitalisasi Desa dan Desa Wisata  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur telematika di desa yang meliputi *market place*, Bank Data Potensi Ekonomi Desa, Konten Kreator Desa, Revitalisasi Sistem Informasi Desa, Pengembangan Obyek Wisata, Peningkatan kapasitas pelaku wisata
- 08 Peningkatan Investasi Desa Serta Kerja Sama dengan Korporasi Nasional dan Investor dari Luar Negeri
- 09 Penguatan Pengawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penerapan akuntabilitas sosial, desa antikorupsi, penerapan *open government* Indonesia di desa, dan pengaduan masyarakat serta yang mengarah pada terjadinya korupsi serta monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa
- 10 Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan dengan upaya menuju desa berketahanan iklim dan desa tangguh bencana



2. PDP PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

00 Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

01 Perencanaan Teknis Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa

02 Perencanaan Teknis Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perencanaan Teknis

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa

03 Perencanaan Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Perencanaan Teknis

Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa

04 Perencanaan Teknis Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa

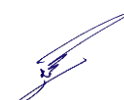
01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

01 Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman

02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Konektivitas

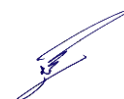
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana konektivitas



- 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Sosial Budaya  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya
- 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
- 02 Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan
  - 01 Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan Perlindungan Sosial  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial
  - 02 Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya
  - 03 Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan desa inklusif dan desa adat
  - 04 Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Kebencanaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan



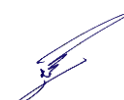
- 05 Pengembangan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat
- 03 Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan
  - 01 Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan
  - 02 Fasilitasi Pendampingan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendampingan
  - 03 Kerja sama Desa dan Perdesaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama desa dan perdesaan
  - 04 Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan
- 04 Fasilitasi dan Pemanfaatan Dana Desa
  - 01 Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan dana Desa  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa
  - 02 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Dana Desa secara Partisipatif  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif



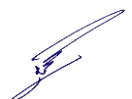
- 03 Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemanfaatan dana desa
- 04 Pengelolaan Sistem Informasi Dana Desa  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi dana desa

3. PEI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

- 00 Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Perencanaan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi
  - 02 Perencanaan Teknis Pelayanan Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelayanan investasi
  - 03 Perencanaan Teknis Pengembangan dan hilirisasi Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan
  - 04 Perencanaan Teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan

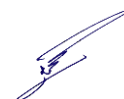


- 01 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama
  - 02 Pengembangan Badan Pengelola Kawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan pengelola kawasan
  - 03 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi Masyarakat
  - 04 Pengembangan Kelembagaan Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan investasi
- 02 Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Pelayanan Informasi Pemetaan Potensi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi
  - 02 Pelayanan Perizinan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan
  - 03 Fasilitasi akses Permodalan dan Peningkatan Penyertaan Modal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akses permodalan
  - 04 Pengembangan Kewirausahaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan





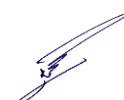
- 03 Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Pengembangan Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan
  - 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi, dan Pengembangan Teknologi Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan
  - 03 Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan
  - 04 Pengembangan Teknologi dan Hilirisasi Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pembiayaan produk unggulan
- 04 Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan
  - 01 Pengembangan Strategi Pemasaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran
  - 02 Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama Pemasaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran
  - 03 Pengembangan Promosi Unggulan dan Daerah Tertinggal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan



- 04 Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran produk unggulan
- 05 Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu

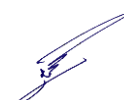
4. PDT PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 00 Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
  - 01 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan
  - 02 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana
  - 03 Penyerasian Rencana dan Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
  - 04 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Khusus  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus

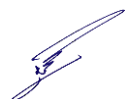




- 01 Penyerasian Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal
  - 01 Penyerasian Pembangunan Modal Sosial Dan Kelembagaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan
  - 02 Penyerasian Pembangunan Modal Budaya  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal budaya
  - 03 Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga dan Masyarakat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat
  - 04 Penyerasian Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah
- 02 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana
  - 01 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Energi dan Air  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi energi dan air
  - 02 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan



- 03 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
- 04 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman, dan Sanitasi Lingkungan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, dan sanitasi lingkungan
- 03 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
  - 01 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan
  - 02 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Terbarukan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan
  - 03 Penyerasian Pengelolaan Kebencanaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pengelolaan kebencanaan
  - 04 Penyerasian Adaptasi Iklim dan Pengelolaan Lingkungan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan
- 05 Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus
  - 01 Penyerasian Pembangunan Kawasan Perbatasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan



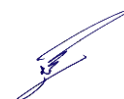
- 02 Penyerasian Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar
- 03 Penyerasian Pembangunan Kawasan Strategis  
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan strategis

5. BPI PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

- 00 Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan
  - 02 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan dan Daerah Tertinggal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan dan daerah tertinggal
  - 03 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal
  - 04 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana pemberdayaan masyarakat desa



- 01 Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi
  - 02 Pengembangan Teknologi Tepat Guna  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan teknologi tepat guna
  - 03 Pengembangan Teknologi Digital  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan teknologi digital
- 02 Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan
  - 02 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan dan Daerah Tertinggal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan dan daerah tertinggal
  - 03 Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  
Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal
  - 04 Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa



- 03 Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Pengembangan Sistem Informasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi
  - 02 Pengelolaan Teknologi Informasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan teknologi informasi
  - 03 Pengelolaan Data dan Informasi

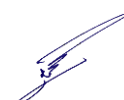
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi
  - 04 Pengembangan Kerja Sama Data dan Informasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kerja sama data dan informasi
- 6. SDM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL
  - 00 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
    - 01 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

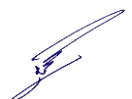
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat pengembangan pemberdayaan masyarakat
    - 02 Pengembangan Sistem dan Model Pemberdayaan Masyarakat

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat
    - 03 Pengembangan Sistem Pelayanan Pendampingan Masyarakat

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat

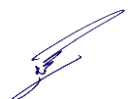


- 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal
  - 01 Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Sumber Daya Manusia  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia
  - 02 Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan
  - 03 Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi
  - 04 Pengembangan Kerja Sama Pelatihan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan
- 02 Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara
  - 01 Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan
  - 02 Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan
  - 03 Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatih  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih
  - 04 Pengembangan Kerja Sama Pelatihan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan
- 03 Pembinaan Jabatan Fungsional
  - 01 Rencana dan Program Pengembangan Jabatan Fungsional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana dan program pengembangan jabatan fungsional





- 02 Pengembangan Standardisasi Kompetensi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi kompetensi
- 03 Pengembangan Profesi, Sertifikasi Kelembagaan, dan Jabatan Fungsional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan profesi, sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional
- 04 Evaluasi dan Penilaian Jabatan Fungsional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan penilaian jabatan fungsional
- 04 Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 01 Perencana dan Program Pengembangan Fasilitas dan Pelatihan Masyarakat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitas dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal di bidang perencanaan dan program pengembangan fasilitas dan pelatihan masyarakat
  - 02 Pelaksanaan Fasilitas dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitas dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal di bidang pelaksanaan fasilitas dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia



- 03
- Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Fasilitasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal di bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (SEKRETARIS JENDERAL)		
Pengendali Teknis (KARO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN)		
Pengendali Aspek Hukum (KARO HUKUM)		
Materi (KASUBAG TU BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN)		

